



Learn | Engage | Promote

Jl. Kayee Lee-Peukan Bileue,
Lr. SMKN 01 Al-Mubarkeya
Kecamatan Ingin Jaya
Kabupaten Aceh Besar, 23230
Aceh-Indonesia



katahatiinstitute_aceh

katahatiinstitute

katahati.or.id

katahati_aceh



info@katahati.or.id

Katahati Institute didirikan 2 dekade yang lalu pada Juni 2001 sebagai Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh. Cikal bakal organisasi ini sudah ada sejak awal tahun 1999, meskipun saat itu Aceh sedang dalam masa konflik.

Katahati Institute lahir dari keprihatinan terhadap dinamika Aceh yang harus terus dikoreksi akibat konflik politik yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat sipil.

Sebagai organisasi yang berorientasi pada perubahan, kami membangun organisasi ini untuk mencapai visi menciptakan masyarakat yang sejahtera dan demokratis. Misi kami dengan melakukan intervensi studi kebijakan publik, terlibat dengan masyarakat rentan, dan advokasi termasuk promosi media. Kami menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian visi dan misi membutuhkan masyarakat yang bersinergi. Kemampuan untuk meningkatkan dan melakukan perubahan merupakan upaya berkelanjutan dengan mengedepankan aspek sosial, kekuatan lokal, kesetaraan dan partisipasi dari berbagai pihak.

Katahati Institute dicatatkan sebagai badan hukum dengan nama Yayasan Katahati Nomor 13 tanggal 22 Juni 2001 pada Notaris Ali Gunawan Istio, SH kemudian diperbaharui dengan ketentuan mengikuti UU Yayasan dengan Akta Nomor 22 tanggal 15 Agustus 2007 pada Notaris Ali Gunawan Istio, SH dan Akta Perubahan Nomor 77 tanggal 29 November 2007 pada Notaris Ali Gunawan Istio, SH dengan nama Yayasan Katahati Aceh.

Terakhir disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0001659.AHA.01.05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Badan Hukum Yayasan Katahati Aceh, tanggal 3 Desember 2021.

Katahati Institute was founded 2 decades ago at June 2001 as CSO-Civil Society Organization in Aceh. The embryo of this organization has existed since early 1999, although at that time Aceh was on conflict period.

Katahati Institute was born out of concern for the dynamics of Aceh which must be continuously corrected due to political conflicts that have caused the powerlessness of civil society.

As a change-oriented organization, we built this organization to achieve the vision of creating a prosperous and democratic society. Our mission by conducting public policy studies intervention, engage with the community vulnerable, and advocacy including media promoting. We are fully aware that the achievement of the vision and mission requires a synergized society. The ability to improve and make changes is an ongoing effort by prioritizing social aspects, local strengths, equality and participation from various parties.

Katahati Institute was registered as a legal entity under the name Yayasan Katahati act number 13 dated June 22, 2001 at Notary Ali Gunawan Istio, SH then updated with the provisions following the Foundation Law with act number 22 dated August 15, 2007 at Notary Ali Gunawan Istio, SH and act of amendment number 77 dated November 29, 2007 at Notary Ali Gunawan Istio,SH under the name Yayasan Katahati Aceh.

Last ratified by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Number AHU-0001659. AHA.01.05 of 2021 concerning Changes in the Legal Entity of the Katahati Aceh Foundation, dated December 3, 2021.

GOVERNANCE

Board of Trustee

Chairul Muslim, T. Husen Banta, Risman A. Rahman Munzir

Board of Managing

Teuku Ardiansyah, Liza Dayani, Alfian

Board of Supervisor

T. Asrizal, Miswar Fuad, Fadli Sy

Executive Office



Executive Director

Raihal Fajri



Program Officer

Muhammad Fahry



Finance Officer

Andra Masyhuri



Communication Officer

Cut Qorry Dalila Winardi

Penguatan Demokrasi *Strengthening Democracy*

Demokrasi adalah jalan menuju kesejahteraan yang selalu menjadi tantangan tersendiri di pelbagai wilayah paska konflik. Bangunan demokrasi yang ingin dibangun selalu akan dipengaruhi dengan diskursus serta pemenuhan damai yang belum terselesaikan. Disisi lain, tantangan untuk beradaptasi dengan dominasi pemerintah pusat membutuhkan negosiasi dan kompromi berkelanjutan. Dalam konteks ini pelibatan publik dalam pengambilan keputusan berpotensi diserobot oleh aktor negara dengan alasan perdamaian. Keikutsertaan dalam pemilihan umum yang jujur dan adil hingga berkurangnya dominasi militer dalam berbagai tingkatan pemerintahan membutuhkan keberadaan masyarakat sipil yang kuat

Democracy are a path to prosperity that has always been a challenge in post-conflict regions. The building of democracy that wants to be built will always be influenced by discourse and peaceful fulfillment that has not been resolved. On the other hand, the challenge of adapting to central government dominance requires continuous negotiation and compromise. In this context, public involvement in decision-making has the potential to be seized by state actors cause of peace. Participation in honest and fair elections to reduced military dominance at various levels of government requires a strong civil society.

Keterbukaan Informasi Publik *Public Information Disclosure*

Tata kelola pemerintahan yang berlandaskan keterbukaan informasi yang bertanggung jawab merupakan ciri-ciri pemerintahan modern. Kesempatan seluas-luasnya bagi warga untuk mengetahui rencana maupun kebijakan penyelenggara negara akan mengurangi kesenjangan maupun perilaku korup aparatur negara. Ketersediaan akses ini perlu terus diperjuangkan baik dengan ketersediaan sistem prosedur, perubahan perilaku aparatur, hingga tindakan afirmatif maupun penyediaan teknologi yang berbasis kebutuhan warga.

Indonesia saat ini adalah negara yang mengadopsi prinsip keterbukaan informasi namun dalam banyak tingkatan hal tersebut belum sepenuhnya dijalankan di daerah sehingga perlu advokasi berkelanjutan untuk memperkuat prinsip tersebut.

Good Governance based on disclosure responsible information is a hallmark of modern government. The widest possible opportunity for citizens to know the plans and policies of state administrators will reduce inequality and corrupt behavior of the state apparatus. The availability of this access needs to continue to be fought both with the availability of system procedures, changes in apparatus behavior, to affirmative action and the provision of technology based on citizen needs.

Indonesia is currently a country that adopts the principle of public information disclosure but at many levels it has not been fully implemented in the region so it needs continuous advocacy to strengthen the principle.

Akuntabilitas Sumber Daya Alam *Natural Resources Accountability*

Sumber daya alam merupakan modalitas yang tidak dapat diperbaharui namun menjadi pusat dan ketergantungan berbagai pihak dalam pengelolaannya. Alasan-alasan investasi dan pembangunan seringkali menjadikan sumber daya alam sebagai sasaran dengan meninggalkan kearifan maupun kehadiran warga disekitarnya.

Tanggung jawab individu maupun korporasi dalam aspek lingkungan acap maupun menghindari beban yang harus diemban dengan alasan ekonomi dan bisnis. Masyarakat yang berada diwilayah eksplorasi sumber daya alam hanya menjadi penonton dan kadang kala korban dari ekspansi bisnis individu dan korporasi tersebut.

Kami memilih berada bersama warga dalam mengadvokasi hak mereka dan mendukung upaya tata kelola sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal warga.

Natural resources are modalities that cannot be renewed but become the center and dependence of various parties in their management. The reasons for investment and development often make natural resources as targets by leaving wisdom and the presence of residents around them.

The responsibilities of individuals and corporations in environmental aspects often avoid the burden that must be carried for economic and business reasons. People in areas of natural resource exploration are only spectators and sometimes victims of the expansion of individual businesses and corporations.

We choose to be with community in advocating for their rights and supporting natural resource management efforts based on local wisdom.

Pengarusutamaan Perdamaian *Peace Mainstreaming*

Dari berbagai kajian, pembangunan perdamaian selalu dibayangi dengan potensi pengulangan konflik. Upaya pemenuhan tuntutan perdamaian kadangkala terpaksa ditiadakan dengan alasan waktu dan ketersediaan anggaran. Banyak negara yang gagal dalam menjaga perdamaianya karena hal tersebut.

Perdamaian Aceh merupakan salahsatu penyelesaian konflik yang menjadi modeling dunia. Terus mempromosikan capaian perdamaian menjadi bagian dari keberlanjutan upaya perdamaian itu sendiri dalam berbagai rencana dan tindakan pemerintah maupun masyarakatnya.

From various studies, peacebuilding is always overshadowed by the potential for conflict relapse. Efforts to peace demands are sometimes forced to be abandoned cause of time and budget availability. Many countries fail to maintain their peace because of this.

Peace in Aceh are one of the conflict resolutions that has become a world model. Continuing to promote peace achievements is part of the sustainability of peace efforts themselves in various plans and actions of the government and society.

Hak Dasar dan Partisipasi Publik *Civic Right and Participation*

Negara menjamin hak warganya di dalam konstitusi yang kemudian menjadi tugas penyelenggara negara untuk mempersiapkan dan menyelenggarakannya. Setiap warga negara antara lain memiliki kesetaraan mendapat tempat tinggal yang layak, memperoleh pendidikan dasar, memperoleh penghidupan yang layak, mendapat pelayanan masyarakat, hingga mendapat perlindungan hukum.

Dalam banyak kasus seringkali warga mengalami diskriminasi hingga pelanggaran akan pemenuhan hak-hak tersebut. Kesempatan untuk memperolehnya harus diperjuangkan baik secara formal maupun informal.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, Katahati Institute menjadikan tema ini sebagai salahsatu pilar dalam aktivitas organisasinya.

State has responsibility to fulfil the rights of its citizens in the constitution which then becomes the duty of the state administrator to prepare and administer it. Every citizen, among others, has equality in getting a decent place to live, getting basic education, getting decent livelihood, getting community services, and getting legal protection.

In many cases, citizens often experience discrimination to the point of violation of the fulfillment of these rights. The opportunity to obtain it must be fought for both formally and informally.

As part of civil society, Katahati Institute makes this theme as one of the pillars in its organizational activities

Penguatan Demokrasi *Strengthening Democracy*

Arah demokrasi Aceh pasca konflik dan tsunami membutuhkan narasi dan tujuan baru, dengan dukungan TIFA, Katahati Institute mengembangkan Rancang Bangun Demokrasi dalam Imaji Aceh Baru yang bertujuan menilai dan menganalisis peran para pihak dalam pembangunan demokrasi di Aceh.

Diperiode sebelumnya bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, Katahati Institute terlibat dalam agenda formulasi kebijakan tata kelola pemerintahan, pemilihan umum, termasuk menjadi bagian dari penguatan sistem pemilu. Dukungan ini menghasilkan berbagai dokumen seperti modul Pendidikan pemilih yang mengedepankan GEDSI (Gender Equality, Disabilities and Social Inclusion) dalam berbagai proses dan tahapan. Kami bekerjasama antara lain dengan UNDP, IRI, NDI, LP3ES, dan IFES

The direction of Aceh's democracy after the conflict and tsunami requires a new narrative and goals, with the support from TIFA, Katahati Institute developed Rancang Bangun Demokrasi dalam Imaji Aceh Baru which aims to assess and analyze the role of parties in developing democracy in Aceh.

In the previous period within other civil society organizations, Katahati Institute was involved in governance policy formulation, general elections, including being part of strengthening the electoral system. This support produces various documents such as the Voter Education module that prioritizes GEDSI (Gender Equality, Disabilities and Social Inclusion) in various processes and stages. We collaborate with UNDP, IRI, NDI, LP3ES, and IFES.

Keterbukaan Informasi Publik *Public Information Disclosure*

Dalam mendorong implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Katahati Institute sebagai host Koalisi Keterbukaan Informasi Publik di Aceh (KKIP) dengan peran menyiapkan skema terbentuknya Komisi Informasi Aceh (KIA). AusAID-Local Governance Innovations for Communities in Aceh (LOGIKA 2) menjadi pendukung inisiasi ini. KKIP juga terlibat dalam penyusunan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

In encouraging the implementation of Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Public Information Disclosure law), Katahati Institute as the host of Aceh CSO Coalition (KKIP) with the role of preparing a scheme for the establishment of the Aceh Information Commission (KIA). AusAID-Local Governance Innovations for Communities in Aceh (LOGIKA 2) supports this initiative. KKIP is also involved in the preparation of Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Governing of Public Information Disclosure local law).

EXPERIENCIES

Akuntabilitas Sumber Daya Alam *Natural Resources Accountability*

Dalam beberapa tahun terakhir, sejak 2020 hingga saat ini, Katahati Institute mendorong skema pendampingan komunitas berbasis hasil hutan bukan kayu sebagai sarana ekonomi berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Dukungan ini memastikan keterlibatan perempuan sebagai pelaku utama dalam mengembangkan sumber alternatif mata pencaharian.

Upaya ini didukung oleh The Canada Fund for Local Initiatives yang merupakan skema pendanaan dari Kedutaan Besar Canada untuk Indonesia dan Timor Leste. Selain penguatan kelompok dan usaha, dukungan ini juga dikembangkan kerangka kebijakan berupa reusam (aturan lokal) di tingkat gampong.

In this period, since 2020 until now, Katahati Institute has encouraged community assistance schemes based on non-timber forest products as a means of sustainable economy and environmental sustainability. This support ensures the involvement of women as key actors in developing alternative livelihood.

This effort is supported by The Canada Fund for Local Initiatives which is a funding scheme from the Canadian Embassy to Indonesia and Timor Leste. In addition to strengthening groups and businesses, this support fund also developed a policy framework in the form of reusam (local rules) at the gampong level.

Pengarusutamaan Perdamaian *Peace Mainstreaming*

Pada 2009, dalam upaya mempromosikan perdamaian berkelanjutan dilaksanakan Pelatihan Jurnalisme Damai oleh Katahati Institute bersama AJI Banda Aceh dan CCRPS UIN Ar Raniry. Program ini didukung oleh Kedutaan Jepang untuk Indonesia. Peserta kegiatan ini berasal dari kelompok mahasiswa dan jurnalis pemula dengan sasaran penyebaran pengetahuan tentang pengarusutamaan perdamaian.

Di periode sekarang ini, dukungan pengarusutamaan perdamaian ini diberikan melalui keterlibatan Katahati Institute dalam mendorong ketersediaan norma standar prosedur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Selain itu, juga sedang dikembangkan kerangka kerjasama dengan Nonviolent Peaceforce dalam mendukung implementasi praktik penyelesaian sengketa non yudisial berbasis gampong.

In 2009, in an effort to promote sustainable peace, Katahati Institute conducted Journalism Damai Training with AJI Banda Aceh and CCRPS UIN Ar Raniry. This program is supported by the Japanese Embassy to Indonesia. The participants of this activity came from groups of students and journalists with the aim of disseminating knowledge about mainstreaming peace.

In the current period, support for mainstreaming peace is provided through the involvement of Katahati Institute in encouraging the availability of standard norms and procedures of the Aceh Truth and Reconciliation Commission (KKR). In addition, a framework for cooperation with Nonviolent Peaceforce is also being developed to support the implementation of gampong-based non-judicial dispute resolution practices.

Hak Dasar dan Partisipasi Publik *Civic Right and Participation*

Bersama dengan UNICEF, Katahati Institute mengembangkan Rencana Aksi Perlindungan Sosial Aceh pada tahun 2015 melalui dukungan perumusan dokumen pengembangan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta penyelenggaraan program program/kegiatan perlindungan sosial di Aceh.

Rencana Aksi Perlindungan Sosial Aceh ini diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel. Selain itu menjadi wahana koordinasi antarpihak (pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat sipil, dan penyelenggara perlindungan sosial), termasuk menumbuh kembangkan mekanisme perlindungan sosial berbasis kearifan lokal.

Dalam dukungan ini UNICEF juga memfasilitasi skema data terpadu berbasis masyarakat, Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang bertujuan menyediakan data dinamis dengan fokus layanan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan ril time. Informasi lebih lanjut tentang SIPM dapat diakses pada laman <https://sipbm.bandaacehkota.go.id/new/>

With UNICEF, Katahati Institute developed Rencana Aksi Perlindungan Sosial Aceh, (Aceh Social Protection Action Plan) on 2015 through the support of formulating documents on policy development, planning and budgeting, and implementation of social protection programs/activities in Aceh.

Rencana Aksi Perlindungan Sosial Aceh is expected to function to encourage the realization of a more integrated, participatory, responsive, transparent, and accountable social protection implementation. In addition, it is a vehicle for coordination between parties (local governments, business and industrial sector, such as civil society, and social protection providers), including growing and developing social protection mechanisms based on local wisdom.

On this support, UNICEF also facilitates an integrated community-based data scheme, the Community-Based Development Information System (SIPBM) which aims to provide dynamic data of education, health and population administration services. More information about SIPM can be reach on <https://sipbm.bandaacehkota.go.id/new/>

#kakilangit *Acehnese CSO Knowledge Circle*

Sejak 2014, Katahati Institute mengembangkan inisiatif #kakilangit - Rumah Pengetahuan Masyarakat Sipil Aceh melalui serangkaian proses identifikasi, konsolidasi, dokumentasi, serta kelola pengetahuan melalui dua sisi, (1) sisi pengetahuan yang berisikan inisiasi dan kerja-kerja masyarakat sipil, organisasi dan individu, dan (2) penyediaan akses pengetahuan yang terjangkau melalui sebuah wadah pengelolaan pengetahuan sebagai sumber inspirasi.

Ford Foundation merupakan Lembaga donor yang memberikan dukungan awal untuk inisiasi ini.

Lingkar belajar #kakilangit ini telah berbagi pengetahuan lokal Aceh ke forum internasional diantaranya :

- Pada 2017, dalam The sixty-first session of the Commission on the Status of Women di United Nations Headquarters New York-USA,
- Pada 2019, dalam Summer School Australia-ASEAN Women in Constitution-Building Capacity Development Program yang diselenggarakan oleh Melbourne Law School dan Constitution Transformation Network,
- Pada 2020, dalam Kyoto Conference about Protecting Civic Space with Promote local participation in legal reform processes related to emergency measure,
- Pada 2020, dalam Coady's Conference local women's voices for peace.

Since 2014, Katahati Institute has developed #kakilangit - Aceh Civil Society Knowledge House initiative through a series of processes of identification, consolidation, documentation, and knowledge management through two sides, (1) the knowledge side which contains the initiation and work of civil society, organizations and individuals, and (2) the provision of affordable access to knowledge through a knowledge management platform as a source of inspiration.

The Ford Foundation is the donor agency that provided initial support for this initiative.

This learning circle #kakilangit has divided Aceh's local knowledge to the international forum including:

- *In 2017, at The 61th session of the Commission on the Status of Women di United Nations Headquarters New York-USA,*
- *In 2019, at The Australia-ASEAN Women in Constitution-Building Capacity Development Program Summer School organized by Melbourne Law School and the Constitution Transformation Network,*
- *In 2020, at Kyoto Conference about Protecting Civic Space with Promote Local Participation in Legal Reform processes related to emergency measure,*
- *In 2020, at Coady's Conference local women's voices for peace.*

#basic – belajar *election* asyik *Social Media for Democracy*

Bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala (FISIP USK), sejak awal 2023 Katahati Institute mengembangkan penjangkauan melalui activity feeds social media. Kerjasama ini dilaksanakan dalam mendukung penyelenggaraan #pemilu2024 dan mahasiswa magang FISIP USK.

Kanal youtube (podcast) yang menghadirkan narasumber lintas profesi, dikelola bersama dengan sagoe.tv. Percakapan terkait materi pendidikan pemilih, analisa kepemiluan, hingga prosedur pemilihan menjadi topik pembahasan yang dipandu oleh mahasiswa FISIP USK. Penayangannya dilakukan setiap dua minggu. Penjangkauan ini kemudian diperluas melalui tagar promosi #pemilubermartabat #pemilu2024, dan disebar ulang melalui reels Instagram @katahatiinstitute_aceh

Secara rutin, akun instagram @katahatiinstitute_aceh juga melaksanakan activity feeds dalam bentuk postingan infografis, foto, video, Instagram story, dan live instagram.

In collaboration with the Faculty of Social and Political Science-Syiah Kuala University (FISIP USK), since early 2023 Katahati Institute has developed outreach through social media activity feeds. This collaboration is carried out in supporting the implementation of #pemilu2024 and internship students FISIP USK.

A youtube channel (podcast) that presents cross-professional speakers, managed together with sagoe.tv. The conversations related to voter education materials, electoral analysis, to election procedures are topics of discussion guided by FISIP USK students. Publishing conducted every two weeks. This outreach was later expanded through promotional hashtags #pemilubermartabat #pemilu2024, and redistributed through @katahatiinstitute_aceh instagram reels

Regularly, @katahatiinstitute_aceh instagram account also carries out activity feeds in the form of infographic posts, photos, videos, instagram story, and instagram live.

PARTNER



Canada



LP3ES *Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial*
Institute for Social and Economic Research, Education and Information



Canadian International
Development Agency

SATUNAMA
Menanam Benih Keadilan

